

JAWA POS

RADAR MADIUN

RADAR MAGETAN

Rabu, 16 Maret 2022

--Bupati Menulis--

Peningkatan SDM Perangkat Desa

PADA 1984, Marsius, ahli musik Batak yang tidak lulus SD, diangkat menjadi dosen luar biasa dengan status honorer bidang musik di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Masyarakat kita heran, kok bisa. Sangat tidak lazim. Selama ini, syarat untuk bisa menjadi dosen harus lulus perguruan tinggi.

Pada 2017 lalu, seniman Kirun diberi anugerah Empu Paripurna di bidang teater oleh ISI Surakarta. Dengan pendidikan dasar yang juga tidak tamat, dia diangkat menjadi dosen luar biasa bidang teater tradisi. Memang tidak bisa dimungkiri. Siapa yang meragukan Kirun, dengan segala prestasi dan pengabdian di bidang seni dan tradisi Jawa.

Hal seperti ini biasa terjadi di luar negeri. Namun, belum bisa diterima masyarakat kita. Praktisi yang diminta jadi dosen tamu biasanya punya bekal pendidikan sarjana. Bayangkan kedua seniman di atas, SD saja tidak lulus. Namun, bisa mengajar di perguruan tinggi. Di tengah masyarakat kita yang mengagungkan gelar, bukan kemampuan. Tentu sangat mengherankan.



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Ketika Kemendikbud membuat program Kampus Merdeka, semua bertanya-tanya. Program apalagi itu? Selama ini yang ada di benak masyarakat, setiap ganti menteri kok selalu berganti kebijakan. Yang muncul di masyarakat bisa jadi rasa apriori. Tidak pernah mau menelaah, sejauh mana relevansi program ini bagi perkembangan zaman yang serbacepat.

Maksud Kampus Merdeka di antaranya memberi kesempatan mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung di dunia kerja. Sebagai persiapan karier untuk masa depan. Metode perkuliahan yang lazim selama ini tetap muka. Mahasiswa dibebani mata kuliah dengan jumlah SKS yang sudah ditetapkan untuk lulus.

Dosen menjadi sumber utama dalam belajar-mengajar. Tentu ini akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam memecahkan masalah. Karena kebenaran dan penilaian ada di tangan dosen. Sistem semacam ini tentu mengurangi kemerdekaan mahasiswa untuk mengembangkan diri.

Kemandirian mahasiswa juga diukur dari penulisan skripsi atau tugas akhir. Karena ini pilihan. Asumsinya, karena pilihan, tentu menjadi puncak minat dari masing-masing mahasiswa. Celakanya, tidak sedikit yang menjadikan penulisan skripsi atau tugas akhir hanya sebagai syarat agar cepat lulus. Akhirnya mahasiswa yang lulus kurang memiliki bekal memadai ■

► Baca *Peningkatan...* Hal 19

Peningkatan SDM Perangkat Desa

Sambungan dari Hal.16

Inilah yang coba dijawab Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Mahasiswa dapat mendaftarkan melalui aplikasi Kemendikbud. Mahasiswa bisa belajar di luar kampus lewat program Kampus Mengajar. Juga ada program wirausaha, program magang bersertifikat, program membangun desa (KKN tematik), dan lainnya.

Belajar di luar kampus dapat dilakukan beberapa semester. Setiap semester nantinya akan diakui atau dikonversi kreditnya. Layaknya beban semester ketika kuliah dengan metode klasik. Dengan mengikuti berbagai program itu, mahasiswa diharapkan lebih fleksibel dalam mengembangkan potensi sesuai *passion* dan bakat yang dimiliki.

Marsius dan Kirun yang sangat profesional bisa diangkat menjadi dosen. Mengajar sebagai praktisi di pendidikan tinggi. Pun bagi mahasiswa saat ini, pembelajaran di luar kam-

pus juga bisa dikonversi menjadi angka kredit semester. Persoalan yang muncul, mengapa pengalaman kerja seseorang tidak dapat dikonversi ke angka kredit bila ingin melanjutkan pendidikan.

Contoh kasusnya banyak. Semisal, kepala seksi atau staf di pemerintah desa dan kelurahan. Kendati pendidikan baru tingkat menengah atas, masa kerjanya sudah lebih dari lima sampai sepuluh tahun. Menilik masa kerja dan jabatan yang diemban, tentu yang bersangkutan punya kapasitas yang seharusnya bisa diakui atau dikonversi bila meneruskan kuliah.

Selama ini, orang dengan kapasitas setinggi apa pun, bila kuliah harus menempuh jenjang mulai semester satu sampai selesai. Pengalaman dan kapasitasnya tak diakui. Hanya mereka yang memiliki semangat dan kemauan keras, yang mau melanjutkan kuliah sambil bekerja. Masih beruntung kalau di daerahnya ada perguruan

tinggi. Yang jauh, tentu hanya bisa merenungi nasib.

Pemikiran yang menurut saya berani dan cerdas dicuatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Melalui program *Recognition of Prior Learning* atau Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa). Konsepnya, penyetaraan akademik atas pengalaman kerja untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi.

Portofolio siapa pun yang mengambil program ini dinilai tim verifikasi. Guna menyetarakan pengalamannya menjadi berapa mata kuliah dan kredit. Hal teknis lebih rinci diatur kemudian. Sementara program ini diperuntukkan kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, dan anggota BUMDes.

Melalui program RPL Desa, program S-1 dapat ditempuh dua tahun. Sedangkan S-2 selama satu tahun. Ada dua universitas yang sementara ini ditunjuk. Yaitu Universitas Negeri Surabaya

(Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Kebetulan sepekan lalu saya bertemu rektor Unesa. Berdiskusi tentang program ini. Demi peningkatan SDM desa dan kelurahan di Magetan, tentu saya sangat tertarik. Informasi tersebut saya sampaikan ke jajaran di Pemkab Magetan untuk diteruskan ke seluruh desa. Saya berharap, peningkatan SDM akan berdampak besar bagi pengembangan segala sektor.

Sebab, selama ini upaya pengembangan desa cukup terkendala SDM. Munculnya pendamping desa dan program peningkatan kapasitas lainnya tentu juga karena terbatasnya SDM di desa. Dengan program RPL Desa, aparat desa menjadi unggul dan desa nantinya menjadi berjaya. Tak ada lagi ucapan *wong ndeso* dengan stereotip negatif. Sebaliknya, desa akan menjadi sebuah tempat yang ideal untuk hidup dan bertempat tinggal. ***(naz/c1)